

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 2026



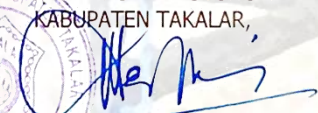
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026 tidak terlepas dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026 mendatang.

Takalar, 25 Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAKALAR,

ABDUL SALAM GAU, S.IP.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19690927 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN.....	44
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	50
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	50
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja 2026.....	57
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Catatan Penting.....	71
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	71
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Perhubungan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terus mengalami pemutakhiran dalam aplikasi SIPD.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2026, dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2026 – 2029 dan Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2026 – 2029. Selanjutnya Renja Kerja Dinas Perhubungan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Tahun 2026, untuk selanjutnya dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2024, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah- kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Pada dasarnya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dishub tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dishub. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dishub sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DINAS PERHUBUNGAN									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						86.80%			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	100%	65%	100%	87.91%	87.91%	143%	473.70%	474%
2	15	01	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.94%	100.00%	100%	100.00%	6.25%	34.38%	34.38%
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	16	4	2	2	100.00%	1	7	43.75%
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	16	1	3	3	100.00%	1	5	31.25%
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16	1	4	4	100.00%	1	6	37.50%

2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	16	1	2	2	100.00%	1	4	25.00%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	14.94%	100%	78%	78.01%	28.45%	56.90%	56.90%
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	2256	567	630	532	84.44%	1,099	2,198	97.43%
						Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan TPP	2256	441	540	380	70.37%	821	1,642	72.78%
						Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Objektifitas Lainnya	2256							
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	1	1	100.00%	3	6	600.00%
2	15	01	###	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	4	2	2	2	100.00%	4	8	200.00%
2	15	01	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.22%	100%	85.43%	85.43%	147.66%	295.42%	295.42%
2	15	1	###	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	0		5	2	40.00%	2	4	#DIV/0!
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	88	21	22	22	100.00%	43	86	97.73%
2	15	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang di sediakan	4000	55	7,000	6000	85.71%	6,055	12,110	302.75%
						Jumlah Penggandaan yang disediakan								
						Jumlah Dokumen yang dijilid								
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dalam Propinsi	100	59	59	27	45.76%	86	172	172.00%

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKeluar Daerah								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluar Propinsi								
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	259%	100%	86%	86.11%	382%	1681.82%	1681.82%
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Listrik yang disediakan	12	10	12	7	58.33%	17	34	283.33%
						Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Air yang disediakan	12	10	12	9	75.00%	19	38	316.67%
						Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Wifi yang disediakan	12	10	12	9	75.00%	19	38	316.67%
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan umum kantor yang disediakan	4	12	60	55	91.67%	67	134	3350.00%
						Jumlah Jasa cleaning service	4	24	24	22	91.67%	46	92	2300.00%
						Jumlah Jasa Sopir		24	24	22	91.67%	46	92	#DIV/0!
						Jumlah Jasa Tenaga Perhubungan		24	144	132	91.67%	156	312	#DIV/0!
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2	1	2	0	0	2	0	

2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentasen Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	37.50%	100%	90.00%	90.00%	150.00%	300.00%	300.00%
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	8	3	10	9	90.00%	12	24	300.00%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG DITETAPKAN	100%	217%	100%	86%	85.69%	247%	494.89%	181.49%
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	100%	30%	100%	83.33%	83.33%	55.00%	110.00%	110.00%
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk yang disusun		5	1	1	100.00%	6	12	#DIV/0!
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	20	1	5	4	80.00%	5	10	50.00%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten / Kota	Persentase Perlengkapan Jalan DiJalan Kabupaten/Kota	100%	1175%	100%	100.00%	100.00%	1200.00%	2400.00%	2400.00%
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlegkapan Jalan dijalan Kabupaten/Kota yang disediakan	4	4	1	1	100.00%	5	10	250.00%
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang dipelihara	4	90	1	1	100.00%	91	182	4550.00%

2	15	02	2.04		Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	100%	6%	100%	100.00%	100%	9%	17.50%	17.50%
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pebangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	80	5	2	100.00%	7	14	17.50%	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji	100%	17%	100%	97%	97%	124%	248.60%	248.60%
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	1	100.00%	2	4	400.00%	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	1	100	100	100.00%	101	202	202.00%
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	4	12	9	75.00%	13	26	2600.00%
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan (kali)	5	12	5	5	100.00%	17	34	680.00%
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Yang dilaksanakan	100%	55%	100%	50.00%	50.00%	57.86%	115.71%	115.71%
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Evektifitas Pelaksana Kebijakan yang dilakukan (bulan)	60	47	6	4	66.67%	51	102	170.00%

2	15	2	2.06	'05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	80	30	2	0	0.00%	30	60	75.00%
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Andalalin yang disetujui	100%	20%	100%	83.33%	83.33%	38.75%	77.50%	77.50%
2	15	02	2.07	01	Peningkatan kompetensi penialaian andalalin	Jumlah Kebijakan Andalalin yang ditetapkan (Keg)	12	12	3	0	0.00%	12	24	200.00%
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (kali)	12	2	1	1	100.00%	3	6	50.00%
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	56	2	14	14	100.00%	16	32	57.14%

Sumber Data : Renstra 2023-2026, Monev TW IV Tahun 2023, 2024, 2025

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sampai Tahun 2024, berdasarkan tabel II.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN hanya 84,44 %. Karena ditarget pegawai yang menerima gaji dan tunjangan adalah 32 orang namun ada yang pensiun dan tidak ada pegawai yang mutasi masuk sehingga target kinerja tidak terpenuhi.

b. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor hanya terealisasi 40 % disebabkan adanya anggaran yang dialihkan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi sebesar 85,71 % karena adanya pergeseran anggaran
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya terealisasi 45,76 %

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari dua sub kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik hanya terealisasi sebesar 58,33%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor, hanya terealisasi 91,67 %

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi 90 %. Hal ini disebabkan karena kendaraan tersebut rusak berat.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program Penyelenggaraan lalu lintas Angkutan Jalan, dalam program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dan 4 diantaranya tidak mencapai target 100 % kegiatan yakni:

a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, terdiri dari satu sub kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, terealisasi hanya 80 %.

- b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, terdiri dari satu sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi hanya 75 %
 - c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, terdiri dari dua sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota terealisasi hanya 66,67 %, tidak tercapai karena adanya pengalihan anggaran.
 - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota tidak terealisasi, karena anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dijalankan.
 - d. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Terdiri dari satu sub kegiatan yang tidak mencapai kinerja yaitu Peningkatan kompetensi penilaian andalalin yakni sebesar 0 %, hal ini disebabkan tidak adanya tenaga ASN yang dikirim untuk mengikuti diklat peningkatan SDM terkait penilai andalalin.
- B. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja.
1. Adanya pegawai yang pensiun dan tidak ada pegawai mutasi masuk sehingga banyak jabatan kosong pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sehingga target kinerja untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan tidak dapat terealisasi.
 2. Kurangnya dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan/subkegiatan mulai dari peyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pada semua aspek. Selain itu diakibatkan juga kurangnya koordinasi yang efektif dengan berbagai OPD dan lembaga.
- C. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu :
- a. Anggaran yang tersedia pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 dapat memenuhi terselenggaranya kegiatan pada program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Adanya dukungan dari pimpinan serta sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan;
- D. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar
- a. Tidak terselenggaranya beberapa sub kegiatan pada Renja sehingga menyebabkan kurangnya persentase capaian kinerja;

- b. Dengan terlaksananya program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar secara maksimal tentu dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam hal pelayanan publik karena meningkatkan kualitas pelayanan tercipta pelayanan prima kepada masyarakat yang akan terdampak pada peningkatan PAD, sehingga dalam hal ini factor pendukung dan factor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pelayanan transportasi.;
 - c. Dengan berhasilnya program/kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sesuai yang target yang diinginkan dapat mencapai peningkatan PAD dan pelayanan transportasi.
- E. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran Untuk mengatasi faktor penyebab sehingga target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan tidak tercapai maka tindakan yang harus dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya adalah lebih meningkatkan koordinasi di tingkat pimpinan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang dikondisikan dengan kemampuan anggaran daerah terkhusus pada kegiatan yang sumber dananya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 0-2
Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINAS PERHUBUNGAN

No	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	Program	2		2	0	2	0	0	83,95	73,46	T	S
2	Kegiatan	11		11	0	8	3	0	83,65	72,58	T	S
3	Sub Kegiatan	27		33	2	16	16	0	82,73	76,87	T	T

Sumber: Renstra 2023-2026

Skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi renja menggunakan kriteria sebagai berikut:

1.91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.76% ≤ 90%	Tinggi
3.66% ≤ 75%	Sedang
4.51% ≤ 65%	Rendah
5. ≤ 50%	Sangat Rendah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara pelayanan dalam urusan Lalulintas telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Tabel 0-3
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAKALAR

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triwulan II	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.000	4.100	Rasio konektivitas	0,70%	0,72%	0,82%	N/A	0,72%	0,82%	
2	Jumlah terminal bis	Terminal 2 Unit	Terminal 2 unit	Persentase peningkatan kendaraan umum dengan kondisi laik jalan	75%	77%	78%	71,56%	77%	78%	
3	Persentase layanan angkutan darat	11.35	14,86	Persentase Keterpenuhan layanan transportasi laut	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
4	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan (m/unit)	113	105	V/C Ratio	0,40%	0,40%	0,20%	N/A	0,40%	0,20%	
5	Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun			Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dalam tahun	10,5%	10,6%	10,3%	9,75%	10,6%	10,3%	

				berjalan							
	Orang	4.000	4.100	Persentase Capaian PAD pada Dinas Perhubungan	85,03%	90%	95%	54%	90%	95%	
	Barang (Kg)	7.000	7.200	Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan	1,03%	1,50%	2%	2,5%	1,50%	2%	
6	Jumlah Uji KIR angkutan umum	3780	3767	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubunngan	B(72,7)	72,8(BB)	72,9(BB)	B(67,33)	72,8(BB)	72,9(BB)	
7	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas perhubungan	N/A	N/A	Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Perhubungan	70%	77%	80%	70%	77%	80%	
8	Nilai sakip Dinas Perhubungan	BB	BB								

Sumber Data : Laporan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kemudahan aksesibilitas antar wilayah, sering dihitung berdasarkan perbandingan jarak yang ditempuh dengan jarak yang seharusnya (ideal), atau dengan membandingkan jumlah ruas jalan terhadap jumlah persimpangan. Rasio digunakan untuk mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota. Adapun rumus perhitungannya adalah Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$, $IK1 (\text{angkutan jalan}) = \frac{(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek})}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}}$, $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \frac{\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut}}$, sampai triwulan dua Tahun 2025 belum diukur oleh bidang teknis terkait.

2. Persentase peningkatan kendaraan umum dengan kondisi laik jalan

Kendaraan kondisi laik jalan adalah kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga aman dan layak digunakan di jalan. Dengan cara perhitungan $\frac{(\text{Jumlah kendaraan dengan kondisi laik jalan tahun ini} - \text{jumlah kendaraan kondisi laik tahun lalu})}{\text{jumlah kendaraan kondisi baik tahun lalu}} \times 100$, Data jumlah kendaraan yang laik uji Tahun 2025 adalah 234 unit dan untuk data hasil uji kendaraan yang laik tahun 2024 adalah 823 sehingga diperoleh capaian capaian presentase hasil uji kendaraan sampai Triwulan II Tahun 2025 adalah 71,56%. Permasalahan yang dihadapi masih kurang sadarnya pemilik kendaraan angkutan umum untuk secara rutin melakukan cek fisik atau uji kendaraan ke unit PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Diharapkan adanya sosialisasi yang lebih massif dari instansi terkait ke masyarakat luas.

3. Keterpenuhan layanan transportasi laut

Keterpenuhan layanan transportasi laut merujuk kepada pada kemampuan system transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi dengan menyediakan layanan yang memadai, aman dan efisien. Cara perhitungannya adalah Jumlah moda transportasi yang ada dibagi jumlah moda transportasi yg dibutuhkan dikali 100. Untuk sampai saat ini jumlah kapal angkutan penumpang yang melayani rute pulau kedaratan berjumlah 29 unit, Untuk kapal yang beroperasi rata rata memuat 30-50 orang penumpang , jumlah penumpang perhari adalah 100 orang. Dengan jumlah tersebut dianggap sudah memenuhi karena tidak terjadi penumpukan penumpang di dermaga-dermaga, hanya pada musim-musim tertentu membutuhkan armada yang lebih misalnya pada saat ramai pesta nikahan dan acara-acara keramaian di kabupaten.

4. V/C Ratio

V/C ratio adalah perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan, rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota, V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. sampai triwulan dua Tahun 2025 belum diukur oleh bidang tekhnis terkait.

5. Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dalam tahun berjalan.

Penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan adalah jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan jalan tahun lalu dikurang jumlah meninggal akibat kecelakaaan pada tahun berjalan dibagi dikurang jumlah meninggal akibat kecelakaaan pada tahun berjalan dikali 100. Untuk sampai triwulan dua 2025 ini mencapai 8,35 %. Jumlah meninggal akibat kecelakaan tahun 2024 adalah 38 orang, sedangkan jumlah meninggal akibat kecelakaan tahun berjalan adalah 24 orang sehingga didapat persentase tingkat fatalitas akibat kecelakaan adalah 58,3%. Untuk

menurunkan angka fatalitas kecelakaan dapat dilakukan pencegahan dengan melakukan pembinaan pengawasan di jalan, serta sosialisasi ke masyarakat luas.

6. Capaian PAD pada Dinas Perhubungan

Persentase capaian PAD adalah jumlah pendapatan yang berhasil diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri. Capaian ini menunjukkan seberapa berhasil daerah dalam mengumpulkan dana dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dapat dihitung dengan cara jumlah realisasi PAD tahun berjalan dibagi target PAD tahun itu dikali 100. Realisasi PAD sampai Juni 2025 yaitu Rp. 129.549.000 sedangkan target PAD Tahun 2025 yaitu Rp. 238.500.000. Jadi persentase realisasi PAD di Bulan Oktober tahun 2025 dicapai 54%.

7. Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan

Persentase Peningkatan PAD adalah Persentase perubahan realisasi PAD suatu daerah dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, yang mengatur perkembangan kemampuan keuangan daerah dari sumber daya lokal. Cara hitungnya adalah Jumlah Realisasi PAD tahun ini dikurang PAD tahun lalu dibagi realisasi PAD tahun lalu dikali 100, realisasi PAD Tahun 2025 sampai Juni adalah sebesar Rp. 129.549.000 dan untuk realisasi PAD Tahun 2024 di bulan Juni adalah Rp. 132.948.000 jadi persentase peningkatan PAD 2025 ini mencapai 2,5 %.

8. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubungan

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat adalah sebuah laporan hasil evaluasi (LHE) yang berisi nilai dan predikat kinerja suatu instansi pemerintah berdasarkan evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP : perencanaan, pengukuran, pelaporan evaluasi internal, dan capaian kinerja. LHE bertujuan memberikan umpan balik positif dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi, serta menjadi dasar bagi satuan kerja untuk meningkatkan

kualitasnya yang lebih baik di masa mendatang. Hasil penilaian SAKIP oleh Tim APIP pada tahun 2025 yakni 67,33, capaian ini masih rendah hal ini disebabkan karena masih ada beberapa dokumen yang belum diselesaikan dan ditindaklanjuti atas temuan inspektorat.

9. Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Perhubungan

Tingkat literasi Digital ASN adalah kesadaran, sikap dan kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi dan informasi digital secara tepat, produktif dan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, mengolah dan memproduksi informasi digital, serta memiliki etika dan keamanan digital yang baik dalam menggunakan media digital dan data. Tingkat literasi digitalisasi ASN Dinas Perhubungan mencapai nilai 70% hingga triwulan II Tahun 2025 karena masih adanya beberapa ASN yang berusia mendekati masa pensiun, secara absensi presensi sudah mampu dioperasikan namun penyusunan SKP masih belum optimal.

Tabel II-4

**Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar
Kabupaten Takalar**

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Konektivitas	0,70	0,70%	0,72%	0,82%	N/A	N/A	0,72	0,82	
2	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	0,40	0,40	0,40	0,8	N/A	N/A	0,40	0,8	

Sumber Data : Renstra 2025-2029 Dinas Perhubungan Kab. Takalar

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kemudahan aksesibilitas antar wilayah, sering dihitung berdasarkan perbandingan jarak yang ditempuh dengan jarak yang seharusnya (ideal), atau dengan membandingkan jumlah ruas jalan terhadap jumlah persimpangan. Rasio ini diukur dengan membandingkan jarak tempuh aktual dengan jarak optimal untuk mencapai suatu tujuan, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik konektivitasnya. Untuk penetapan nilai rasio konektivitas 0,70 seiring dengan target nasional dan diharapkan dapat mencapai nilai 0,82. Sampai saat ini belum ada data hasil perhitungan yang kami dapatkan terkait rasio konektivitas di wilayah Kabupaten Takalar.

2. V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota

V/C ratio adalah perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan dan kecukupan suatu ruas jalan atau persimpangan, dengan rumus sederhana: $V/C \text{ ratio} = \text{Volume} / \text{Kapasitas}$. Untuk sampai saat ini kami belum menemukan data hasil hitung v/c ratio untuk jalan di Kabupaten Takalar. Untuk Tahun 2025 ditargetkan nilai v/c ratio sebesar 0,20-0,39% atau berada kategori sedang. Adapun cara perhitungan **V/C Ratio = Volume Lalu Lintas / Kapasitas Jalan**. Rumus ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan jalan dengan membandingkan jumlah volume lalu lintas yang melewati jalan dengan kapasitas maksimum jalan tersebut.

Tabel 0-5
Pencapaian Kinerja Sustainable Development Goals (SDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
a	Sasaran 3.6 :Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas										
1	3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	11,5	11,3	11,2	10,5	10%	N/A	N/A	N/A	N/A	10,7%
B	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
b	Sasaran 9.1:Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan intas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
1	9.1.2.[b] Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Sumber: Renstra Dishub Tahun 2025-2029

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan dalam target SDGs memiliki dua sasaran yaitu:

1. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas, dimana memiliki target dalam lima tahun kedepan diharapkan angka kematian dapat semakin menurun,dari data yang tersajikan pada tahun 2024 dari target angka kematian kecelakaan akibat cedera fatal sebesar 10% setelah dihitung realisasinya mencapai 10,7%, angka ini menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalulintas yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.Yang menjadi factor pendukung capaian yang baik ini karena masyarakat semakin menyadari pentingnya arti keselamatan dijalan raya.
2. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Perlu diketahui untuk saat ini sampai tahun 2025 di Kabupaten Takalar terdapat dua Pelabuhan yang terletak di Kecamatan Galesong dan Kecamatan Kepulauan Tanakeke, dimana dalam pengelolaannya kedua Pelabuhan tesebut dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi.Diharapkan untuk tahun yang akan datang jumlah pelabuhan dapat bertambah untuk mendukung aktifitas pembangunan di Wilayah Kabupaten Takalar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Faktor yang menjadi penghambat untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan ini karena dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun pelabuhan penyeberangan dan membutuhkan SDM yang handal dalam pengoperasiannya

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Takalar, Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS diketahui permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar antara lain :

- a. Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal.
- b. Pelayanan satu pintu penertiban Izin perhubungan belum berjalanmaksimal.
- c. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk

menguji.

- d. Belum adanya studi beberapa Pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun.
- e. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu perlengkapan jalan.
- f. Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor.

Sedangkan Faktor Penghambat yaitu :

- a. Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD;
- b. Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- c. Belum optimalnya pengelolaan data bidang perhubungan;
- d. Masih belum tercapainya pelayanan sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Masih kurangnya pelayanan manajemen angkutan umum.
Maka isu-isu strategis yang terkait adalah :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran;
 - c. Pengadaan sarana Alat Uji Kendaraan;
 - d. Peningkatan pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi;
 - e. Peningkatan pergerakan penumpang dan barang dari daratan ke kepulauan dan sebaliknya;
 - f. Peremajaan angkutan desa;
 - g. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan / balai uji.
 - h. Pengadaan sistem informasi transportasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II-6
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kab. Takalar	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	100 %	1,207,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kab. Takalar	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	100 %	1.182.000.000	
			Persentase Layanan Angkutan Darat					Persentase Layanan Angkutan Darat			
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	5,000,000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	5,000,000	
01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	
02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di susun	5	5,000,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di susun	5	5,000,000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten / Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten / Kota	100	1,150,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten / Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten / Kota	100	1.150.000.000	

01	Pembangunan Prasarana Jalan diJalan Kabupaten / Kota	Kab. Takalar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		0	Pembangunan Prasarana Jalan diJalan Kabupaten / Kota	Kab. Takalar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		0	
02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	950,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	950.000.000	
03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Takalar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Takalar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	0	
04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Takalar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	200,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Takalar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	200.000.000	
	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Takalar	Cakupan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	100	5,000,000	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Takalar	Cakupan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	100	5,000,000	

	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20	5,000,000	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20	5,000,000	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	25,000,000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	25,000,000	
	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	5,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	5,000,000	
	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	1	5,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	1	5,000,000	
	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	5,000,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	5,000,000	

	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	
	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1	5,000,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1	5,000,000	
	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	30,000,000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	30,000,000	
	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	60	25,000,000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	60	25,000,000	

	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20	5,000,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20	5,000,000	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100	17,000,000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100	17,000,000	
	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen/ Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	3	2,000,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen/ Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	3	2,000,000	
	3	Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	5,000,000	Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	5,000,000	
	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Takalar	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	14	10,000,000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Takalar	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	14	10,000,000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kab. Takalar	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Persentase Layanan Angkutan Darat	100 %	25,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kab. Takalar	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Persentase Layanan Angkutan Darat	100%	25,000,000	
			Kab. Takalar					Kab. Takalar				

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	25,000,000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	25,000,000	
01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	5,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	5,000,000	
02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	1	5,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	1	5,000,000	
04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	5,000,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	5,000,000	
05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	
07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1	5,000,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1	5,000,000	

08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2,500,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Takalar	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	100%	4,796,921,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Takalar	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	100%	4.796.921.900	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7,000,000	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7,000,000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah Perencanaan Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	4	3,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah Perencanaan Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	4	3,000,000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	4	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	4	2,000,000	
04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4	1,000,000	

05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Administrasi Keuangan	100%	4,616,464,700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Administrasi Keuangan	100%	4.616.464.700	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Takalar	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	564	3,416,583,400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Takalar	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	564	3.416.583.400	
		Kab. Takalar	Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan TPP	564	1,056,358,800		Kab. Takalar	Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan TPP	564	1.056.358.800	
		Kab. Takalar	Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Objektifitas Lainnya	564	139,022,500		Kab. Takalar	Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Objektifitas Lainnya	564	139.022.500	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,500,000	

07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4	2,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10,000,000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Takalar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Takalar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	10,000,000	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	101,000,000	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	101.000.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22	12,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22	12,000,000	

05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Takalar	Jumlah barang cetakan yang di sediakan	1000	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Takalar	Jumlah barang cetakan yang di sediakan	1000	35,000,000	
		Kab. Takalar	Jumlah Penggandaan yang disediakan	7000	2,000,000		Kab. Takalar	Jumlah Penggandaan yang disediakan	7000	2,000,000	
		Kab. Takalar	Jumlah Dokumen yang dijilid	100	500,000		Kab. Takalar	Jumlah Dokumen yang dijilid	100	500,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Kabupaten	25	1,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Kabupaten	25	1,500,000	
		Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKeluar Daerah dalam Propinsi	59	25,000,000		Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKeluar Daerah dalam Propinsi	59	25,000,000	
		Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluar Propinsi	5	25,000,000		Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluar Propinsi	5	25,000,000	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Takalar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Takalar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	
05	Pengadaan Mebel	Kab. Takalar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	Pengadaan Mebel	Kab. Takalar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	

07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	0	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,757,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,757,200	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Takalar	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Listrik yang disediakan	12	18,507,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Takalar	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Listrik yang disediakan	12	18,507,200	
		Kab. Takalar	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Air yang disediakan	12	7,200,000		Kab. Takalar	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Air yang disediakan	12	7,200,000	
		Kab. Takalar	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Wifi yang disediakan	12	8,250,000		Kab. Takalar	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Rekening Wifi yang disediakan	12	8,250,000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan umum kantor yang disediakan	1	8,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan umum kantor yang disediakan	1	8,400,000	
		Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa cleaning service yang disediakan	1	8,400,000		Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa cleaning service yang disediakan	1	8,400,000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Takalar	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	11,700,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Takalar	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	11,700,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Takalar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	11,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Takalar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	11,700,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumleng atau boling. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, Dinas Perhubungan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu lintas. Dari hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbang) di 10 (sepuluh) kecamatan terdapat 15 usulan dari masyarakat, namun tidak ada satupun yang dapat diproses atau diakomodir. Hal ini disebabkan karena usulan tersebut satu diantaranya bantuan modal Usaha yang Bukan Merupakan kewenangan Dinas Perhubungan dan beberapa diantara usulan mereka tidak lengkap.

Tabel 0-4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	15 usulan	-	-	-	Terdapat 15 usulan dari masyarakat, namun tidak ada satupun yang dapat diproses atau diakomodir. Hal ini disebabkan karena usulan tersebut satu diantaranya bantuan modal Usaha yang Bukan Merupakan kewenangan Dinas Perhubungan dan beberapa diantara usulan mereka tidak lengkap.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 yang dioperasinalisasikan oleh perangkat daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 yaitu **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
- 2) PDRB per kapita (juta);
- 3) Kontribusi PDRB Provinsi;
- 4) Tingkat Kemiskinan;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 6) Indeks Rasio Gini;
- 7) Indeks Modal Manusia;
- 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 3.1.

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	
---	--

Sumber data : RKP Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 memuat outcome prioritas, program dan sub kegiatan yang mendukung asta cita.

Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu “**Meningkatnya Sistem Transportasi**”, untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 4 sasaran sebagai berikut:

- 1. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi.
- 2. Sasaran 2: Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas
- 3. Sasaran 3: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan
- 4. Sasaran 4: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.2.

Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.14.0000- Dinas Perhubungan											
S5. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatnya Sistem Transportasi		Rasio Konektivitas	0,70	0,70	0,72	0,73	0,75	0,77	0,80	
NSPK: Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahl; Undang – undang no.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perbup Bupati Takalar no. 55 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta		S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi	Persentase peningkatan kendaraan dengan kondisi laik jalan (%)	83%	75%	77%	78%	80%	85%	90%	
			Persentase Keterpenuhan layanan transportasi laut (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (%)	0,78	0,78	0,77	0,75	0,72	0,70	0,68	
			Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas tahun berjalan (%)	10,7%	10,5%	9,79%	9,70%	9,50%	9,20%	9,0%	
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli	Persentase Capaian PAD pada Dinas Perhubungan (%)	104%	85,03%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tata Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar		Daerah pada Dinas Perhubungan									
			Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan (%)	1%	1,03%	1,50%	2%	2,5%	3%	3,5%	
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubungan(nilai)	B(67,33)	72,7	72,8	72,9	73	73,1	73,3	
			Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Perhubungan(%)	70%	70%	75%	80%	82%	85%	90%	

Tabel III.3.
 Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	Target 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)
S5. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatnya Sistem Transportasi		Rasio Konektivitas	0,70	0,78
NSPK: Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahl; Undang – undang no.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perbup Bupati Takalar no. 55 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Perhubunganl Kabupaten Takalar		S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi	Persentase peningkatan kendaraan dengan kondisi laik jalan (%)	83%	77%
			Persentase Keterpenuhihan layanan transportasi laut (%)	100%	100%
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (%)	0.40	0,8
			Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas tahun berjalan (%)	11,7%	9,79%
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan	Persentase Capaian PAD pada Dinas Perhubungan (%)	104%	100%
			Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan (%)	1%	1,50%
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubunngan(nilai)	B(67,33)	72,8
			Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Perhubungan(%)	70%	75%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Daerah. Sebagaimana dalam RKP Tahun 2026 disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS); bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026. RKPD ini akan dioperasionalisasikan dalam rencana kerja perangkat daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.1.1. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita Tahun 2026 **Prioritas Nasional 15: Kemudahan perizinan di daerah** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Program Prioritas Presiden (Nasional)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
15. Kemudahan perizinan di daerah	2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	2.15.2.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.07.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp. 5.000.000

4.1.2. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan**, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Program Prioritas Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
80	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	2.15.2.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.2.2.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 3.000.000
			2.15.2.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.02.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	RP. 12.000.000
				2.15.2.2.02.4 Rehabilitasi dan	RP. 1.523.000

No.	Program Prioritas Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			2.15.2.2.04 Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.2.2.04.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 2.500.000
			2.15.2.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.2.2.05.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 2.500.000
				2.15.2.2.05.4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 2.500.000
				2.15.2.2.05.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000.000
				2.15.2.2.05.7 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 4.000.000
			2.15.2.2.06 Pelaksanaan dan Manajemen	2.15.2.2.06.4 Pengawasan dan Pengendalian	Rp. 10.000.000

No.	Program Prioritas Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
			Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	
				2.15.2.2.06.5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 2.500.000
				2.15.2.2.06.16 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-
			2.15.2.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.06.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp. 5.000.000

4.1.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas daerah-4: Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
35	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	2.15.2.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.2.2.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 3.000.000
			2.15.2.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.02.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	RP. 12.000.000
				2.15.2.2.02.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RP. 1.523.000
			2.15.2.2.04 Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.2.2.04.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 2.500.000
			2.15.2.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.2.2.05.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 2.500.000
				2.15.2.2.05.4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Rp. 2.500.000

No.	Program Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Kendaraan Bermotor	
				2.15.2.2.05.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000.000
				2.15.2.2.05.7Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 4.000.000
			2.15.2.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.06.4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Rp.10.000.000
				2.15.2.2.06.5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 2.500.000
				2.15.2.2.06.16 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-
			2.15.2.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.06.3 Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp. 5.000.000

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja 2026

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 berjumlah 2 (dua) Program, 12 Kegiatan dan 24 sub kegiatan, dengan total pagu Rp. 6.299.026.178,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						6.299.026.178							0,00	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.609.843.278						-	0,00	
		[Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Perhubungan]	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	4.609.843.278								
	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1	500.000						1	500.000	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1	500.000						1	500.000	
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					1	500.000						1	500.000	
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	500.000	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatifMe mperkuat Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	1	500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					564	4.039.977.802						564	4.114.472.252	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	500.000						1	500.000	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				4 Laporan	500.000	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	4	500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 paket	1.000.000						1 paket	1.000.000	
	2.15.01.2.04.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					22	5.996.000						22	5.996.000	
	2.15.01.2.04.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25	25.984.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatifMe mperkuat Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	25	25.984.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	3.287.376						12	3.287.376	
		-	-	-	-	-		4.609.843.278							0,00	
	2.15.01.2.06.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Kab. Takalar, Pattalla ssang, Kalabbir ang	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	7.Peningkat an layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur , investasi padat karya dan berwawasan lingkungan Pengemban gan Infrastruktur	-			DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
		[Meningkatkan Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Perhubungan]	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100							100		
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22	638.400.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifMemperkuat Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	22	638.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2	12.000.000						2	14.000.000	
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1.689.182.900, 00						-		
		[Meningkatnya Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Dinas Perhubungan]	-	-	-	-	-	1.689.182.900, 00								
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					100	5.020.000						100	5.020.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-							-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatifMe mperkuat Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	-	0,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					1	12.000.000						1	12.000.000	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100	1.523.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PAJAK DAERA H, DANA ALOKA SI UMUM (DAU), PBJT- KONSU MSI TENAG A LISTRIK YANG DIHASI	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif			1.603.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
										LKAN SENDIR I						
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir														
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					20	2.500.000						20	2.500.000	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	123.494.600,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatifMe mperkuat Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1	2.500.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	1	2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1	2.500.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	1	2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1	1.000.000						1	1.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					5	4.000.000						5	4.000.000	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	19.888.600,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatifMe mperkuat Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	-	0,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				60	10.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	60	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah						
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					20	2.500.000							20	2.500.000		
	-	-	-	-	-	-	-	1.689.182.900,00								0,00		
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																
	-						2	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur , investasi padat karya dan berwawasan lingkunganPengembangan Infrastruktur	-	-	2	2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			-	-			-				-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	-		
	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin															
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3	5.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	3	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-	-	0,00	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelengga raan pemerintah an yang akuntabel dan inovatif Memperkua t Pertumbuha n Ekonomi Kreatif dan Inovatif	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Takalar, 25 Juni 2025


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAKALAR,
ABDUL SALAM GAU, S.IP.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19690927 199101 1 002